

*Dampak Kebijakan Migrasi Internal Terhadap Perilaku Pasar Kerja Di Indonesia (Safrida et al.)*

## **DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI INTERNAL TERHADAP PERILAKU PASAR KERJA DI INDONESIA<sup>1)</sup>**

***(The Impact of Internal Migration Policy on Labor Market Behavior in Indonesia)***

**Safrida, Bonar M. Sinaga<sup>2)</sup>,  
Hermanto Siregar<sup>2)</sup>, dan Harianto<sup>2)</sup>**

### **ABSTRACT**

*Migration is a natural process to distribute labor surplus in origin regions to destination regions having a high level of labor demand, but in recent years migration causes labor surplus and unemployment in the destination region. The objective of this paper is to analyze the influence of migration on labor market behavior and to evaluate the impact of internal migration policy on labor market behavior in Indonesia. To reach this objective, a simultaneous equation model containing 15 structural equations and 5 identities equations are constructed. The analysis use time series 1985-2006 data. Model was estimated by 2SLS method and simulation was used the Newton method. The results of this research indicated that migration influence labor supply in Jawa, Kalimantan and other island. Factors that influence labor demand in Java are amount of industry and government development expenditure, but in Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and other island influenced by total investment, government development expenditure and lag labor demand. The impact of internal migration policy on labor market by way of increasing minimum wage can not solve labor market problem because the policy cause increase unemployment in each island. The impact of increasing minimum wage and government development expenditure can solve labor market problem through decreasing unemployment, although average wage in each island is increasing. The policy can also solve distribution of population by way of decreasing migration to Jawa.*

*Key words: internal migration, labor market*

### **PENDAHULUAN**

Ketimpangan pasar kerja merupakan masalah utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena jumlah angkatan kerja jauh lebih besar daripada kemampuan penyerapan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Migrasi merupakan suatu proses alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja pada suatu daerah ke daerah yang tingkat daya serap tenaga kerjanya tinggi, khususnya daerah yang mempunyai sektor industri modern. Jawa merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang paling berkembang sektor industrinya. Menurut Litbang Kompas (2006), sekitar 89% jumlah industri yang tersebar pada pusat-pusat industri di Indonesia terdapat di

---

<sup>1)</sup> Bagian dari disertasi penulis pertama, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana IPB

<sup>2)</sup> Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing

Pulau Jawa, selebihnya terdapat di Sumatera 9%, dan Sulawesi 2%. Dengan demikian, pulau ini menjadi daerah tujuan imigrasi di Indonesia. Meskipun 60% dari total penduduk dan pengangguran di Indonesia terdapat di pulau tersebut, tetapi kondisi ini tidak menyurutkan penduduk pulau-pulau lain di Indonesia untuk migrasi ke Jawa.

Menurut Todaro (1998), migrasi merupakan fenomena ekonomi, dan keputusan migrasi merupakan keputusan yang rasional. Para migran tetap migrasi, meskipun pengangguran cukup tinggi di daerah tujuan. Tindakan ini dilakukan karena adanya perbedaan upah dan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Para migran selalu membandingkan pasar kerja yang tersedia bagi mereka pada dua daerah tersebut. Kemudian akan memilih salah satunya jika dapat memaksimumkan keuntungan.

Ditinjau dari sisi upah, asumsi tersebut belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia karena upah di Jawa lebih rendah daripada upah yang berlaku di pulau-pulau lainnya. Tabel 1 memperlihatkan rata-rata upah dan gaji bersih pekerja menurut pulau.

Tabel 1. Rata-rata upah gaji bersih pekerja selama sebulan menurut pulau tahun 2002-2006

Pulau	Upah/gaji (Rp/bulan)					Pertumbuhan (%)
	2002	2003	2004	2005	2006	
Sumatera	711 585	754 925.3	798 945	784 945	870 985	4.1
Jawa	753 265	751 181.6	749 100	755 550	802 885	1.3
Kalimantan	908 281	927 990.5	947 700	975 145	1 021 670	2.4
Sulawesi	623 080	742 939.2	862 800	739 025	803 015	5.2
Pulau lain	678 670	797 556.7	916 440	903 890	949 305	6.9

Sumber: Badan Pusat Statistik 2002-2006

Tabel tersebut memperlihatkan rata-rata upah tertinggi terdapat di Kalimantan, sedangkan rata-rata upah di Jawa masih lebih rendah jika dibandingkan dengan upah yang berlaku di kawasan kepulauan lainnya. Namun, Pulau Jawa tetap menjadi kawasan yang paling diminati para imigran di Indonesia. Berdasarkan kenyataan ini, migrasi internal khususnya migrasi masuk ke Jawa dapat menyebabkan surplus tenaga kerja dan memperburuk masalah pengangguran. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam migrasi internal tersebut. Di antara kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi dan kebijakan umum penyelenggaraan transmigrasi yang diatur dalam GBHN 1983. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Secara umum, semua kebijakan ini bertujuan meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah pertanian dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa, yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para migran dan masyarakat disekitarnya. Kebijakan-kebijakan tersebut juga menyatakan bahwa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan migrasi ke luar Jawa, yang harus ditingkatkan adalah jumlah migran, koordinasi, dan penyelenggaraan migrasi yang meliputi penetapan daerah tujuan migrasi, penyediaan lahan usaha dan pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah,

prasarana jalan dan transportasi, sarana produksi, dan usaha pengintegrasian migran dengan penduduk setempat (Pusdatintran, 2004).

Hingga saat ini, sangat sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, justru sebaliknya migrasi dari luar Jawa ke Jawa semakin meningkat sehingga diperlukan suatu analisis untuk mengetahui kebijakan migrasi apa yang dapat mendorong terlaksananya kebijakan-kebijakan migrasi yang telah ditetapkan pemerintah tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap distribusi penduduk dan pasar kerja di Indonesia dan bagaimana pengaruh migrasi ini terhadap pasar kerja masing-masing pulau. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh migrasi terhadap perilaku pasar kerja di Indonesia dan (2) mengevaluasi dampak kebijakan migrasi internal terhadap distribusi penduduk dan pasar kerja di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Model Ekonomi Pasar Kerja Indonesia disusun dalam bentuk persamaan simultan yang terdiri tiga blok, yaitu (1) blok migrasi yang terdiri dari 43 persamaan struktural dan 15 persamaan identitas, (2) blok pasar kerja yang terdiri dari 15 persamaan struktural dan 5 persamaan identitas, dan (3) blok makroekonomi yang terdiri dari 15 persamaan struktural dan 5 identitas. Berdasarkan kriteria *order condition*, setiap persamaan struktural dalam penelitian ini menunjukkan *over identified*. Estimasi model dilakukan dengan 2SLS (*two state least square*). Validasi menggunakan kriteria *root mean square percent error (RMSPE)* dan *Theil's inequality coefficient (U)*. Dalam tulisan ini difokuskan pada blok pasar kerja dan persamaan yang berhubungan langsung dengan imigrasi adalah persamaan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya, persamaan ini akan mempengaruhi upah, pengangguran, dan permintaan tenaga kerja. Persamaan penawaran tenaga kerja adalah sebagai berikut.

$$STKJ_t = a_0 + a_1WJ_t + a_2MIGINJ_t + a_3MIGOUTJ_t + a_4MIGEXJ_t + a_5POPJ_t + a_6LSTKJ_t \dots \dots \dots (1)$$

$$STKS_t = b_0 + b_1WS_t + b_2LNMIGS_t + b_3MIGEXS_t + b_4POPS_t + b_5LSTKS_t + U_{2t} \dots \dots \dots (2)$$

$$STKK_t = c_0 + c_1WK_t + c_2MIGINK_t + c_3MIGOUTK_t + c_4MIGEXK_t + c_5POPK_t + c_6LSTKK_t + U_{3t} \dots \dots \dots (3)$$

$$STKP_t = e_0 + e_1WP_t + e_2MIGINP_t + e_3MIGOUTP_t + e_4MIGEXP_t + e_5POPP_t + e_6LSTKP_t + U_{5t} \dots \dots \dots (4)$$

Simulasi kebijakan yang dilakukan adalah simulasi historis (*ex-post simulation*) pada tahun 2001-2006. Alternatif simulasi kebijakan yang dilakukan adalah instrumen kebijakan yang mendorong tercapainya kebijakan migrasi internal.

Simulasi 1: Kebijakan peningkatan UMP rata-rata di Jawa (UMPJ) 15% dan UMP rata-rata di Sumatera (UMPS), Kalimantan (UMPK), Sulawesi (UMPSL) dan pulau lain (UMPP) 20%.

Simulasi 2: Kebijakan penurunan suku bunga 200 basis poin atau 2%

Simulasi 3: Pengeluaran pembangunan di Jawa (GEXPJ) meningkat 10%, dan di pulau-pulau lainnya (GEXPS, GEXPK, GEXPSL, dan GEXPP) 15%.

Simulasi 4: Gabungan simulasi kebijakan 1 dan 3.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data rangkaian waktu (*time series*) dari tahun 1985-2006. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Depnakertrans, Laporan

Tahunan Bank Indonesia, *World Bank*, ILO, ADB dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi model dilakukan pada program SAS melalui prosedur SYSLIN. Setelah dilakukan beberapa kali respesifikasi model, model yang dibentuk dalam penelitian ini dianggap sudah memenuhi kriteria ekonomi dan statistik. Berdasarkan kriteria statistik, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) secara umum cukup besar antara 0.945 hingga 0.999 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas yang terdapat di dalam model mampu menjelaskan fluktuasi setiap variabel endogennya secara baik. Nilai uji F, sebagian besar nilai Prop>F bernilai <.0001 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel penjelas dapat menjelaskan variabel endogennya secara nyata. Hasil estimasi ini juga menunjukkan seluruh variabel penjelas menghasilkan tanda parameter estimasi sesuai hipotesis dan teori ekonomi.

### **Pengaruh Migrasi terhadap Perilaku Pasar Kerja di Indonesia**

Situasi pasar kerja Indonesia dicirikan oleh relatif terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di sektor formal dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Akibatnya, pasar kerja Indonesia menjadi dualistik, yakni sebagian kecil pekerja bekerja di sektor formal, sedangkan mayoritas pekerja hanya dapat tertampung di sektor informal yang memiliki kondisi kerja, termasuk tingkat upah yang rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor formal. Hal ini masih ditambah lagi dengan masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja setiap tahun (SMERU, 2003).

Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pada setiap pulau. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, terlihat bahwa permintaan tenaga kerja setiap pulau umumnya dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan dan *lag* permintaan tenaga kerja pada masing-masing pulau. Hal ini terjadi karena semakin tinggi pengeluaran pembangunan, semakin banyak proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik proyek pembangunan yang baru maupun rehabilitasi proyek pembangunan yang sudah ada. Dalam melaksanakan proyek tersebut diperlukan tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja juga semakin meningkat. Permintaan tenaga kerja menunjukkan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja dari tahun ke tahun.

Selain kedua faktor tersebut, permintaan tenaga kerja di Jawa dipengaruhi juga oleh jumlah industri peningkatan jumlah industri di Jawa satu unit akan meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja di Jawa sebanyak 430 orang. Kondisi ini menunjukkan jumlah industri merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga pesatnya pertumbuhan industri di pulau tersebut merupakan pendorong penduduk dari pulau lain untuk migrasi ke Jawa.

Berbeda dengan hasil estimasi permintaan tenaga kerja di Jawa, permintaan tenaga kerja di pulau-pulau lain dipengaruhi juga oleh total investasi dan luas lahan. Menurut *Asian Development Bank* (2005), modal mempunyai peran sentral dalam proses pertumbuhan *output*. Akumulasi modal sangat diperlukan untuk meningkatkan daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi

ketersediaan modal, semakin tinggi pula kemampuan perekonomian tersebut menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa investasi merupakan faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain. Demikian juga dengan luas lahan, peningkatannya membuka peluang bagi pekerja untuk mengolahnya agar dapat menghasilkan sesuatu produk.

Tabel 2. Hasil estimasi parameter persamaan permintaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain

Nama Variabel	Variabel	Estimasi Parameter	t-hit	Pr >  t	Elastisitas	
					Jangka pendek	Jangka panjang
Permintaan TK di Jawa	DTKJ					
Intersep		20694651	3.400	0.004		
Jumlah Industri di Jawa	INDJ	429.463	2.230	0.040	0.133	0.231
Lag Total Investasi di Jawa	LINVJ	0.283	0.030	0.974		
Pengeluaran Pembangunan di Jawa	GEXPJ	309.785	2.530	0.022	0.036	0.063
Lag Permintaan TK di Jawa	LDTKJ	0.423	2.380	0.030		
$R^2 = 0.9519$		$F_{hit} = 79.1200$	$( < .0001)$	$DW = 1.8285$		
Permintaan TK di Sumatera	DTKS					
Intersep		1630637	1.410	0.178		
Total Investasi di Sumatera	INVS	10.734	4.080	0.001	0.011	0.081
Pengeluaran Pembngunan di Sumatera	GEXPS	0.226	1.840	0.085	0.038	0.279
Luas Lahan di Sumatera	LLHS	41.105	1.210	0.246	0.009	0.066
Lag Permintaan TK di Sumatera	LDTKS	0.863	13.770	<.0001		
$R^2 = 0.9910$		$F_{hit} = 442.4900$	$( < .0001)$	$DW = 1.6642$		
Permintaan TK di Kalimantan	DTKK					
Intersep		656436.90	2.570	0.021		
Total Investasi di Kalimantan	INVK	7.2165	1.440	0.168	0.012	0.084
Pengeluaran Pembngunan di Kalimntrn	GEXPK	0.0003	0.010	0.995	0.006	0.044
Perubahan Luas Lahan di Kalimantan	PLLHK	13.7925	0.650	0.527		
Lag Permintaan TK Kalimantan	LDTKK	0.8564	12.600	<.0001		
$R^2 = 0.9698$		$F_{hit} = 128.5300$	$( < .0001)$	$DW = 2.5816$		
Permintaan TK di Sulawesi	DTKSL					
Lag Total Investasi di Sulawesi	LINVSL	12.061	1.570	0.135		
Pengeluaran Pembngunan di Sulawesi	GEXPSL	0.908	2.630	0.018	0.198	0.824
Luas Lahan di Sulawesi	LLHSL	242.860	1.850	0.081	0.048	0.201
Lag Permintaan TK di Sulawesi	LDTKSL	0.760	7.500	<.0001		
$R^2 = 0.9988$		$F_{hit} = 3519.1700$	$( < .0001)$	$DW = 2.50299$		
Permintaan TK di pulau lain	DTKP					
Intersep		6297321	50.500	<.0001		
Total Investasi di pulau lain	INVP	1.168	0.180	0.858	0.002	
Pengeluaran Pembangunan di P. Lain	GEXPP	0.441	1.550	0.141	0.074	
Perubahan Luas Lahan di pulau lain	PLLHP	281.889	5.890	<.0001		
$R^2 = 0.7645$		$F_{hit} = 18.3900$	$( < .0001)$	$DW = 1.1603$		

Hasil estimasi pada Tabel 3 juga menunjukkan penawaran tenaga kerja pada setiap pulau umumnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan lag penawaran tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk pada setiap pulau di Indonesia sebagian besar tergolong dalam penduduk usia kerja, sehingga peningkatannya sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Lag penawaran tenaga kerja menunjukkan adanya peningkatan penawaran tenaga kerja dari tahun ke tahun.

Penawaran tenaga kerja di Jawa selain dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh jumlah migran keluar dari pulau ini, yakni peningkatan 1000 orang migran ke luar akan menurunkan penawaran tenaga kerja di Jawa sebesar 1972 orang. Kondisi ini menunjukkan untuk mengantisipasi tingginya jumlah angkatan kerja di Jawa, hal yang paling penting dilakukan oleh

pemerintah daerah di Jawa adalah menekan pertumbuhan populasi dan meningkatkan jumlah migrasi keluar dengan menggalakkan kembali program transmigrasi. Upah tidak berpengaruh nyata terhadap penawaran tenaga kerja di pulau ini, kondisi ini menunjukkan bahwa upah bukan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya jumlah penawaran tenaga kerja di Jawa karena tenaga kerja di pulau ini bersedia bekerja pada berapa pun tingkat upah yang tersedia yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran.

Tabel 3. Hasil estimasi parameter persamaan penawaran di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain

Nama Variabel	Variabel	Estimasi Parameter	t-hit	Pr >  t	Elastisitas	
					Jangka pendek	Jangka panjang
Penawaran TK di Jawa	STKJ					
Intersep		-3130294	-0.330	0.750		
Upah Rata-rata di Jawa	WJ	0.634	0.180	0.857	0.003	0.012
Migran yang Masuk Ke Jawa	MIGIN	0.194	0.340	0.739	0.030	0.115
Migran yang Keluar dari Jawa	MIGOUT	-1.972	-1.670	0.117	-0.194	-0.745
Migran internasional dari Jawa	MIGEXJ	-0.630	-0.160	0.874	-0.002	-0.008
Populasi di Jawa	POPJ	228.966	1.480	0.162	0.500	1.925
Lag Penawaran TK di Jawa	LSTKJ	0.740	3.900	0.002		
$R^2 = 0.9907$		$F_{hit} = 249.5000 (<.0001)$	$DW = 2.4335$			
Penawaran TK di Sumatera	STKS					
Upah Rata-rata di Sumatera	WS	3.830	2.010	0.062	0.059	0.191
Lag Net Migran di Sumatera	LNMIGS	0.201	0.520	0.613		
Migran internasional dari Sumatera	MIGEXS	-0.311	-0.10	0.923	-0.001	-0.002
Populasi di Sumatera	POPS	105.000	2.990	0.009	0.244	0.794
Lag Penawaran TK di Sumatera	LSTKS	0.693	7.810	<.0001		
$R^2 = 0.9999$		$F_{hit} = 32093.9000 (<.0001)$	$DW = 2.0040$			
Penawaran TK di Kalimantan	STKK					
Intersep		536182.70	1.550	0.144		
Upah Rata-rata di Kalimantan	WK	1.034	3.230	0.006	0.073	0.073
Migran yang Masuk Ke Kalimantan	MIGINK	1.242	2.520	0.025	0.364	0.364
Migran yang Keluar dari Kalimantan	MIGOUT	-4.530	-1.62	0.128	-0.265	-0.265
Migran internasional dari Kalimantan	MIGEXK	-0.689	-0.60	0.555	-0.006	-0.006
Populasi di Kalimantan	POPK	321.427	3.610	0.003	0.720	0.7201
Lag Penawaran TK di Kalimantan	LSTKK	0.0001	0.000	0.999		
$R^2 = 0.9914$		$F_{hit} = 269.8900 (<.0001)$	$DW = 2.3084$			
Penawaran TK di Sulawesi	STKSL					
Intersep		-2884435	-2.330	0.034		
Upah Rata-rata Rata-rata di Sulawesi	WSL	0.482	0.540	0.595	0.023	
Migran Masuk ke Sulawesi	MIGINSL	2.057	1.230	0.239	0.208	
Migran Keluar dari Sulawesi	MIGOTSL	-0.291	-0.190	0.855	-0.038	
Migran internasional dari Sulawess	MIGEXSL	-123.780	-1.270	0.225	-0.015	
Populasi di Sulawesi	POPSP	545.599	2.770	0.014	1.332	
$R^2 = 0.9809$		$F_{hit} = 154.4400 (<.0001)$	$DW = 2.3041$			
Penawaran TK di pulau lain	STKP					
Intersep		270611.500	0.190	0.849		
Upah Rata-rata di P.Lain	WP	1.320	3.300	0.005	0.064	0.065
Migran yang Masuk Ke P. Lain	MIGINP	1.538	0.980	0.342	0.146	0.148
Migran yang Keluar dari P.Lain	MIGOUTP	-0.374	-0.360	0.722	-0.030	-0.030
Migran internasional dari P.Lain	MIGEXP	-6.468	-1.410	0.182	-0.023	-0.023
Populasi di pulau lain	POPP	373.934	2.310	0.037	0.793	0.805
Lag Penawaran TK di P.Lain	LSTKP	0.015	0.070	0.947		
$R^2 = 0.9529$		$F_{hit} = 47.1500 (<.0001)$	$DW = 2.4179$			

Berbeda dengan penawaran tenaga kerja di Jawa, penawaran tenaga kerja di Sumatera, Kalimantan, dan pulau lain dipengaruhi oleh upah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja di pulau-pulau tersebut masih berjalan sesuai dengan hukum ekonomi penawaran tenaga kerja, peningkatan upah mendorong penduduk usia kerja dipulau tersebut masuk kedalam pasar kerja.

Jumlah migran masuk dan keluar dari Kalimantan juga mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pulau tersebut. Hasil estimasi menunjukkan migrasi masuk ke pulau tersebut berhubungan positif dengan penawaran tenaga kerjanya dengan nilai parameter estimasinya 1.24. Sebaliknya migrasi keluar dan internasional berhubungan negatif dengan penawaran tenaga kerja dengan nilai parameter estimasinya berturut-turut -4.53 dan -0.69. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika migran yang masuk atau keluar dari Kalimantan berhasil di daerah tujuan, maka mereka menjadi stimulan bagi migran lain untuk migrasi ke daerah tersebut, sehingga menambah atau mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja di pulau tersebut.

Hasil estimasi persamaan penawaran tenaga kerja di pulau lain menunjukkan bahwa migran internasional juga berpengaruh nyata terhadap penawaran tenaga kerjanya dengan nilai parameter estimasi -6.47. Hal ini terjadi karena tingginya jumlah migran internasional yang berasal dari pulau lain, khususnya migran dari nusa tenggara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Depnakertrans (2005), rata-rata 13.56% dari total migran internasional asal Indonesia berasal dari pulau lain.

Hasil estimasi parameter upah rata-rata pada setiap pulau, kecuali Sumatera (Tabel 4) menunjukkan hanya upah minimum dan kebutuhan hidup minimum yang berpengaruh nyata terhadap upah rata-rata. Hal ini disebabkan dasar penetapan upah rata-rata di Indonesia adalah upah minimum provinsi pada masing-masing pulau tersebut dan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup minimum. Upah minimum seharusnya upah terendah yang diterima pekerja formal, sedangkan upah yang diterima pekerja sebaiknya merupakan hasil perundingan antara pekerja dan pemberi kerja, meskipun posisi tawar pekerja masih sangat rendah. Berdasarkan data BPS (2006), rata-rata upah riil di Jawa adalah 421.8 ribu rupiah. Kebutuhan hidup minimum riil untuk pekerja lajang adalah 267.7 ribu rupiah (lebih tinggi daripada upah minimum riil). Kondisi ini menunjukkan jika kebutuhan hidup minimum meningkat, dengan tingkat upah yang sama pekerja tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga. Oleh karena itu, pekerja melalui serikat pekerja akan menuntut perusahaan untuk meningkatkan upah.

Upah rata-rata di Sumatera secara parsial dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, dan kebutuhan hidup minimum. Kondisi ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di pulau-pulau lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tersedianya peluang-peluang kerja di pulau tersebut baik pada sektor formal maupun informal sehingga di pulau tersebut masih berlaku hukum ekonomi permintaan dan penawaran tenaga kerja, yaitu tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, bukan berarti upah minimum tidak menjadi dasar penetapan upah rata-rata di Sumatera, pengaruh tersebut berbeda-beda antarprovinsi dan bahkan antarpekerja. Terdapat provinsi-provinsi di Sumatera yang upah rata-ratanya terpengaruh oleh upah minimum dan ada juga yang tidak.

Tabel 4. Hasil estimasi parameter persamaan rata-rata upah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain

Nama Variabel	Variabel	Estimasi Parameter	t-hit	Pr >  t	Elastisitas	
					Jangka pendek	Jangka panjang
<b>Upah Rata-rata di Jawa</b>						
Intersep	WJ	182705.9	0.610	0.548		
Upah Minimum Rata-rata di Jawa	UMRJ	1.419	1.730	0.106	0.775	1.061
Permintaan TK di Jawa	DTKJ	0.004	0.250	0.805	0.827	1.132
Penawaran TK di Jawa	STKJ	-0.009	-0.630	0.540	-1.766	-2.416
Kebutuhan Hidup Minimum di Jawa	KHMJ	0.309	0.780	0.449	0.201	0.275
Inflasi di Jawa	INFJ	368.575	0.570	0.577	0.015	0.021
Lag Upah Rata-rata di Jawa	LWJ	0.269	1.290	0.218		
$R^2 = 0.9447$	$F_{hit} = 39.8700 (<.0001)$		$DW = 1.2016$			
<b>Upah Rata-rata di Sumatera</b>						
Intersep	WS	-263515	-3.46	0.004		
Perubahan UMR di Sumatera	PUMRS	0.088	0.240	0.815		
Permintaan TK di Sumatera	DTKS	0.061	2.910	0.011	3.787	18.610
Penawaran TK di Sumatera	STKS	-0.042	-2.46	0.028	-2.760	-13.565
KHM di Sumatera	KHMS	0.296	2.020	0.063	0.192	0.945
Inflasi di Sumatera	INFS	62.082	0.280	0.780	0.003	0.013
Lag Upah Rata-rata di Sumatera	LWS	0.797	6.900	<.0001		
$R^2 = 0.9888$	$F_{hit} = 205.0300 (<.0001)$		$DW = 1.4718$			
<b>Upah Rata-rata di Kalimantan</b>						
Intersep	WK	-125778	-2.130	0.051		
UMR di Kalimantan	UMRK	0.598	2.090	0.055	0.275	0.351
Lag Permintaan TK di Kalimantan	LDTKK	0.125	1.140	0.273		
Lag Penawaran TK di Kalimantan	LSTKK	-0.089	-0.890	0.388		
K Hidup Minimum di Kalimantan	KHMK	0.793	3.450	0.004	0.464	0.593
Inflasi di Kalimantan	INFK	69.767	0.190	0.853	0.002	0.003
Lag Upah Rata-rata di Kalimantan	LWK	0.217	0.960	0.354		
$R^2 = 0.9864$	$F_{hit} = 169.6900 (<.0001)$		$DW = 1.6611$			
<b>Upah Rata-rata di Sulawesi</b>						
Intersep	WSL					
Upah Minimum Rata-rata di Sulawesi	UMRSL	0.850	2.560	0.021	0.403	
Permintaan TK di Sulawesi	DTKSL	0.012	0.250	0.802	0.238	
Penawaran TK di Sulawesi	STKSL	-0.005	-0.100	0.923	-0.097	
Kebutuhan Hidup Minimum di Sulawesi	KHMSL	0.718	2.600	0.019	0.439	
Inflasi di Sulawesi	INFSL	353.133	1.260	0.226	0.015	
$R^2 = 0.9961$	$F_{hit} = 824.6500 (<.0001)$		$DW = 1.1887$			
<b>Upah Rata-rata di P.Lain</b>						
Intersep	WP					
Intersep	Intercept	-74077.500	-0.5600	0.5848		
UMR di P.Lain	UMRP	1.0084	1.6200	0.1250	0.4649	0.9311
Lag Permintaan TK di P.Lain	LDTKP	0.0235	0.8800	0.3933		
Penawaran TK di P.Lain	STKP	-0.0086	-0.2500	0.8046	-0.1763	-0.3531
Lag Inflasi di P.Lain	LINFP	375.1849	0.7200	0.4843		
Lag Upah Rata-rata P.Lain	LWPP	0.5008	1.5300	0.1458		
$R^2 = 0.9836$	$F_{hit} = 180.3800 (<.0001)$		$DW = 2.0599$			

### Dampak Alternatif Kebijakan Migrasi Internal terhadap Distribusi Penduduk dan Pasar Kerja di Indonesia

Kemampuan prediksi model ekonomi pasar kerja di Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini telah divalidasi dengan simulasi dasar untuk periode 2001-2006. Hasil validasi menunjukkan 75% dari jumlah persamaan memiliki nilai RMSPE yang rendah dan 87% dari jumlah persamaan memiliki nilai *U-Theil's* mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa model yang telah dirumuskan dan telah diestimasi cukup valid digunakan untuk analisis simulasi historis.

Kebijakan migrasi internal yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk penyebaran dan penyediaan tenaga kerja serta pembukaan lapangan kerja baru melalui pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah di luar Jawa. Untuk mencapai tujuan tersebut, simulasi kebijakan yang dilakukan



dalam penelitian ini menggunakan instrumen kebijakan migrasi internal yang bertujuan meningkatkan jumlah migran keluar dari Jawa dan mengurangi jumlah migran masuk ke pulau tersebut sehingga distribusi penduduk di Indonesia lebih merata. Simulasi kebijakan ini juga bertujuan mengatasi masalah pasar kerja di setiap pulau di Indonesia. Hasil analisis dampak alternatif kebijakan migrasi internal terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rangkuman dampak alternatif kebijakan migrasi internal

Variabel endogen	Satuan	Nilai simulasi dasar	Perubahan (%)			
			S1	S2	S3	S4
MIGSJ (Migran Sumatera-Jawa)	orang	1585741.00	-0.02	-0.40	-0.10	-0.07
MIGKJ (Migran Kalimantan-Jawa)	orang	250571.00	1.70	-0.04	0.01	1.72
MIGSLJ (Migran Sulawesi-Jawa)	orang	206130.00	-2.02	-0.01	0.11	-1.78
MIGPJ (Migran pulau lain-Jawa)	orang	250901.00	-5.86	0.01	0.27	-5.23
MIGINJ (Total Migran Masuk Ke Jawa)	orang	2293343.00	-0.65	-0.28	-0.03	-0.59
MIGINS (Total Migran Masuk Ke Sumatera)	orang	4330336.00	0.21	-0.38	-0.02	-0.05
MIGINK (Total Migran Masuk Ke Kalimantan)	orang	1711956.00	-0.80	0.04	0.02	-0.77
MIGINSL (Total Migran Masuk Ke Sulawesi)	orang	682454.00	-0.08	0.03	0.69	0.94
MIGINP (Total Migran Masuk Ke pulau lain)	orang	590893.00	-1.34	0.58	-1.75	-4.60
MIGJS (Migran Jawa-Sumatera)	orang	4087132.00	0.23	-0.41	-0.03	-0.05
MIGJK (Migran Jawa-Kalimantan)	orang	1212193.00	-1.13	0.06	0.03	-1.09
MIGJSL (Migran Jawa-Sulawesi)	orang	371233.00	-0.15	0.05	1.27	1.74
MIGJP (Migran Jawa-pulau lain)	orang	328347.00	-2.41	1.04	-3.16	-8.27
MIGOUTJ (Total Migran Keluar dari Jawa)	orang	5998905.00	-0.22	-0.20	-0.10	-0.59
MIGOUTS (Total Migran Keluar dari Sumatera)	orang	1739497.00	-0.02	-0.36	-0.09	-0.06
MIGOUTK (Total Migran Keluar dari Kalimantan)	orang	326597.00	1.30	-0.03	0.01	1.32
MIGOUTSL (Total Migran Keluar dari Sulawesi)	orang	857045.00	-0.49	-0.01	0.03	-0.43
MIGOUTP (Total Migran Keluar dari pulau lain)	orang	686947.00	-2.14	0.01	0.10	-1.91
DTKJ (Permintaan Tenaga Kerja di Jawa)	orang	55534083.00	-0.01	0.01	0.56	1.12
DTKS (Permintaan TK di Sumatera)	orang	18939400.00	-0.01	0.49	0.39	0.57
DTKK (Permintaan TK di Kalimantan)	orang	5232402.00	-0.05	0.33	0.37	0.51
DTKSL (Permintaan TK di Sulawesi)	orang	6444985.00	-0.24	0.06	1.86	2.55
DTKP (Permintaan TK di pulau lain)	orang	7571327.00	-0.30	0.01	1.52	1.97
STKJ (Penawaran TK di Jawa)	orang	56526198.00	0.22	0.15	0.07	0.42
STKS (Penawaran TK di Sumatera)	orang	20954560.00	0.03	0.26	0.21	0.33
STKK (Penawaran TK di Kalimantan)	orang	5606818.00	0.20	0.07	0.06	0.28
STKSL (Penawaran TK di Sulawesi)	orang	6866735.00	0.55	0.01	0.16	0.79
STKP (Penawaran TK di pulau lain)	orang	7719890.00	1.52	0.07	0.15	1.67
UJ (Pengangguran di Jawa)	orang	992114.00	12.53	7.96	-27.82	-38.79
US (Pengangguran di Sumatera)	orang	2015160.00	0.34	-1.87	-1.45	-1.93
UK (Pengangguran di Kalimantan)	orang	374417.00	3.56	-3.63	-4.37	-3.02
USL (Pengangguran di Sulawesi)	orang	421750.00	12.61	-0.84	-25.85	-26.17
UP (Pengangguran di pulau lain)	orang	148563.00	94.55	3.27	-69.76	-13.81
WJ (Upah Rata-rata di Jawa)	rupiah	521179.00	13.50	-0.17	0.25	13.91
WS (Upah Rata-rata di Sumatera)	rupiah	424125.00	0.08	1.93	1.47	2.32
WK (Upah Rata-rata di Kalimantan)	rupiah	559989.00	6.91	0.27	0.32	7.40
WSL (Upah Rata-rata di Sulawesi)	rupiah	458258.00	9.15	0.01	0.31	9.62
WP (Upah Rata-rata di pulau lain)	rupiah	632631.00	15.71	-0.01	0.53	16.52

Keterangan:

S1 (Simulasi 1): Peningkatan UMPJ 15% dan UMPS, UMPK, UMPSL, dan UMPP 20%

S2 (Simulasi 2): Penurunan suku bunga 2%

S3 (Simulasi 3): Peningkatan GEXP di Jawa 10%, dan GEXPS, GEXPK, GEXPSL, dan GEXPP 15%

S4 (Simulasi 4): Kombinasi Simulasi 1 dan 3

Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi baik penawaran maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada

masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja (Smeru, 2001). Hasil simulasi kebijakan peningkatan upah minimum di Jawa 15% dan pulau-pulau lainnya 20% juga memperlihatkan kondisi yang sama, yakni peningkatan upah minimum menyebabkan peningkatan upah rata-rata pada setiap pulau, tetapi akibat peningkatan upah rata-rata tersebut justru menurunkan kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja pada setiap pulau dengan penurunan terbesar terjadi di Pulau Sulawesi dan pulau lain masing-masing 0.24 dan 0.30%. Kondisi ini terjadi karena bagi pengusaha, upah merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjanya, semakin tinggi upah, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Untuk tetap memperoleh keuntungan yang tetap sama atau lebih, tuntutan kenaikan upah akan direspons oleh pengusaha dengan mengurangi permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, peningkatan upah akan direspons oleh penduduk usia kerja untuk masuk ke dalam pasar kerja sehingga terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja pada setiap pulau. Akibatnya, peningkatan pengangguran di pulau-pulau tersebut juga meningkat dalam jumlah yang besar masing-masing 12.6 dan 94.6%. Dengan demikian, kebijakan ini belum mampu mengatasi masalah pasar kerja pada setiap pulau yang terlihat dari meningkatnya jumlah pengangguran.

Ditinjau dari sisi distribusi penduduk, peningkatan upah minimum ini berdampak pada penurunan jumlah migran masuk ke Jawa sebesar 0.65%. Penurunan terbesar berasal dari migran pulau lain, yaitu 5.86%. Hal ini disebabkan oleh tingginya peningkatan upah di pulau tersebut untuk migrasi ke Jawa. Namun, kebijakan ini belum mampu meningkatkan jumlah migran dari pulau tersebut, masalah distribusi penduduk dapat diatasi dengan kebijakan ini.

Tabel 5 juga memperlihatkan bahwa dampak kebijakan migrasi internal melalui penurunan suku bunga dua% (Simulasi 2) adalah peningkatan permintaan tenaga kerja pada masing-masing pulau. Permintaan tenaga kerja terbesar terjadi di Sumatera 0.49%, dan permintaan tenaga kerja terkecil terjadi pulau lain. Peningkatan permintaan tenaga kerja ini merupakan akibat dari peningkatan investasi yang disebabkan penurunan suku bunga. Peningkatan permintaan tenaga kerja ini dapat meningkatkan upah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan upah rata-rata di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sedangkan upah rata-rata di Jawa dan pulau lain menurun masing-masing sebesar 0.20% dan 0.01%. Hal ini terjadi karena persentase peningkatan permintaan tenaga kerja lebih kecil persentase peningkatan penawaran tenaga kerja di pulau-pulau tersebut sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di pulau-pulau tersebut. Hasil simulasi menunjukkan pengangguran di Jawa dan pulau lain meningkat masing-masing 7.96% dan 3.27%, sedangkan pengangguran di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun masing-masing -1.87, -3.63, dan -0.84%.

Peningkatan permintaan tenaga kerja dan upah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga menyebabkan turunnya jumlah migran dari pulau-pulau tersebut untuk migrasi ke Jawa, masing-masing sebesar 0.40%, 0.04%, dan 0.01%. Namun, tidak demikian halnya dengan jumlah migran dari pulau lain ke Jawa, jumlah migran dari pulau tersebut ke Jawa meningkat sebesar 0.01%. Berdasarkan hasil simulasi ini, terlihat bahwa kebijakan penurunan suku bunga dapat mengatasi masalah distribusi penduduk melalui penurunan jumlah migran masuk ke Jawa dan mengatasi masalah tenaga kerja di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi melalui peningkatan permintaan tenaga kerja dan penurunan jumlah

pengangguran di wilayah tersebut. Namun, kebijakan ini masih belum mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut di Pulau Jawa dan pulau lain.

Hasil simulasi peningkatan pengeluaran pembangunan di Jawa 10% dan di pulau-pulau lainnya 15% (Simulasi 3), menunjukkan dampak kebijakan ini berupa peningkatan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada setiap pulau. Hal yang menarik dari hasil simulasi ini adalah terjadinya peningkatan upah rata-rata pada setiap pulau walaupun permintaan tenaga kerja juga meningkat. Dampak kebijakan ini terhadap distribusi penduduk adalah terjadinya penurunan jumlah migran yang masuk ke Jawa, tetapi masih belum mampu meningkatkan jumlah migran keluar dari pulau tersebut.

Oleh karena peningkatan upah minimum dapat memberi dampak buruk terhadap pasar kerja di Indonesia, untuk memenuhi tuntutan peningkatan upah minimum semakin gencar diupayakan oleh pekerja pada akhir-akhir ini, perlu dilakukan simulasi kebijakan peningkatan upah minimum dibarengi dengan kebijakan yang dapat membuka peluang kerja bagi pekerja, seperti kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan. Hasil simulasi gabungan kedua kebijakan ini adalah terjadinya peningkatan upah rata-rata yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Peningkatan terbesar terjadi di Pulau Jawa dan pulau lain masing-masing 13.9 dan 16.5%. Namun, peningkatan upah tersebut tidak menimbulkan pengangguran karena kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja setiap pulau. Ditinjau dari sisi distribusi penduduk, dampak kebijakan ini dapat membatasi jumlah migran masuk ke Jawa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- (1) Migrasi internal mempengaruhi penawaran tenaga kerja di Jawa dan Kalimantan, sedangkan migrasi internasional mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pulau lain. Selain migrasi, penawaran tenaga kerja di Jawa dipengaruhi juga oleh jumlah populasi, sedangkan penawaran tenaga kerja di Kalimantan dan pulau lain dipengaruhi juga oleh upah rata-rata dan populasi. Penawaran tenaga kerja di Sumatera dan Sulawesi hanya dipengaruhi oleh upah rata-rata dan jumlah populasi.
- (2) Jumlah industri dan pengeluaran pembangunan di Jawa merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di pulau tersebut, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain adalah investasi, pengeluaran pembangunan, dan *lag* permintaan tenaga kerja pada masing-masing pulau. Khusus untuk Sulawesi dan pulau lain dipengaruhi juga oleh luas lahan yang sementara tidak digunakan.
- (3) Secara umum, upah rata-rata di setiap pulau dipengaruhi oleh upah minimum regional, kebutuhan hidup minimum, dan upah rata-rata sebelumnya. Kecuali di Sumatera, faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja di pulau tersebut.
- (4) Dampak kebijakan migrasi internal melalui peningkatan upah minimum terhadap pasar kerja adalah peningkatan upah rata-rata, peningkatan penawaran tenaga kerja, dan penurunan permintaan tenaga kerja sehingga

pengangguran semakin meningkat pada setiap pulau. Kebijakan ini mampu mengatasi masalah distribusi penduduk dengan menurunkan jumlah migran masuk ke Jawa.

- (5) Dampak kebijakan migrasi internal melalui gabungan kebijakan peningkatan upah minimum dan pengeluaran pembangunan adalah terjadinya peningkatan upah serta penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran pada setiap pulau. Kebijakan ini juga mampu mengatasi masalah distribusi penduduk dengan menurunkan jumlah migran masuk ke Jawa.

### Saran

- (1) Kebijakan peningkatan upah minimum mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja dan meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga pengangguran di masing-masing pulau juga meningkat. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan pekerja agar upah minimum ditingkatkan, kebijakan ini harus dibarengi dengan kebijakan yang dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kerja tersebut. Kebijakan gabungan peningkatan upah minimum dan peningkatan pengeluaran pembangunan merupakan kebijakan yang baik untuk dilaksanakan karena mampu meningkatkan upah dan menurunkan pengangguran serta mampu menurunkan jumlah migran masuk ke Jawa.
- (2) Oleh karena dampak simulasi kebijakan dalam penelitian ini tidak dapat melihat jumlah migran dari satu pulau ke pulau lainnya selain Pulau Jawa, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel jumlah migran keluar dari pulau satu ke pulau lainnya selain Pulau Jawa sebagai variabel endogen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2005. Jalan Menuju Pemulihan: Iklim Investasi di Indonesia. <http://www.adb.org/stat/>
- Bellante, D. dan Mark, J. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Clark, K.A. and Rosmerry, H. 2000. Measuring the demand for labor in the United States: The job openings and labor turnover survey. <http://www.bls.gov/>.
- Darmawan, B. 2007. *Perkiraan Pola Migrasi Antar Propinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Ketertarikan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Lembaga Demografi.
- Espindola, A.L., and Jaylison, J.S. 2006. A Harris-Todaro agent-based model to rural-urban migration. *Brazilian Journal of Physics*. 36 (3A): 603-609.
- Islam, I. and Nazara, S. 2000. Minimum wage and the welfare of Indonesian workers. ILO Jakarta Office. <http://www.ilo.org/inst/>.

- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Method*. Second Edition. London: The MacMillan Press Ltd.
- Martin, P.L. 2003. Sustainable Migration Policies In A Globalizing World. International Institute for Labor Studies, Geneva. <http://www.ilo.org/inst/>.
- Pusdatintrans. 2004. *Transmigrasi Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Smeru. 2001. Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. <http://www.smeru.or.id/>.
- Sukwika, T. 2003. Analisis pasar tenaga kerja dan migrasi di Kabupaten Bogor [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Todaro, M.P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.